

PENGARUH RED FLAGS DAN INDEPENDENSI AUDITOR PEMERINTAH DALAM MENDETEKSI KECURANGAN (*FRAUD*)

(Studi Kasus Pada Auditor BPKP DKI Jakarta)

¹Mochammd Bayu Nur Cahya, ²Krishna Kamil

Departemen Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
Jakarta, Indonesia

bayunurcahya7@gmail.com; krishnakamil@gmail.com

***Abstrak-** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh red flags dan independensi auditor pemerintah dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian ini dilakukan pada Kantor BPKP Pusat DKI Jakarta.*

Pengambilan Sensus Sampling dengan jumlah 77 auditor. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer. Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi penelitian yang bersifat asosiatif dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode survei kuesioner. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang bersifat kuantitatif yang diukur dengan metode berbasis regresi linear berganda yaitu uji t IBM SPSS 25.

Hasil penelitian membuktikan bahwa, (1) Red Flags berpengaruh positif dan signifikan dalam mendeteksi kecurangan (Fraud), (2) Independensi Auditor Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan dalam mendeteksi kecurangan (Fraud).

Kata Kunci: *Red Flags, Independensi Auditor Pemerintah, mendeteksi kecurangan, Fraud.*

1. PENDAHULUAN

Fraud dalam banyak jenis dan modus sudah menjadi permasalahan klasik di dalam aktivitas bisnis. Kecurangan dapat terjadi di sektor privat maupun juga pada sektor publik sejak bertahun-tahun yang lalu hingga sekarang. Segala cara telah dilakukan guna mencegah dan mengatasi serangkaian kecurangan yang terjadi. Mulai dari meningkatkan pengawasan, memperkuat fungsi pada setiap bagian, memberikan sanksi hukum yang berat kepada pelakunya, namun hal itu masih saja tidak membuat kecurangan menjadi berkurang. Di bidang ekonomi, Meningkatnya skandal akuntansi di berbagai Negara merupakan suatu tantangan besar bagi profesi akuntansi di dunia. Salah satu skandal akuntansi yang menyita perhatian dunia adalah kasus Enron, yang memotivasi regulator di negara Amerika Serikat menerbitkan Statement on Accounting Standards No. 99 untuk meningkatkan kinerja Auditor dalam mendeteksi terjadinya salah saji material karena kecurangan (Fraud) dalam penyajian pelaporan keuangan (Hulsart et al. 2012). Selain Amerika Serikat, skandal kecurangan akuntansi juga terjadi di negara Indonesia yang ditunjukkan dengan adanya likuidasi yang terjadi pada sektor perbankan, terlibatnya pihak manajemen pada kejahatan Kerah Putih, manipulasi pajak, serta terjadinya korupsi dalam lembaga pelaksanaan pemilu dan Dewan Perwakilan Rakyat di berbagai daerah.

Pengukuran tingkat Korupsi menggunakan Corruption Perception Index pada tahun 2019 menempatkan Indonesia pada posisi 85 dari 180 negara Negara, serta skor indeks persepsi korupsi Indonesia saat ini berada di angka 40 dengan nilai tertinggi 100 (Transparency International 2019). Kecurangan disebabkan sebagai permasalahan yang paling serius dan menantang didalam lingkungan bisnis saat ini hingga perlu adanya langkah – langkah proaktif dari akuntan, Auditor, dan Profesi Akuntansi untuk dapat mendeteksi kecurangan ini. Fraud merupakan suatu kesengajaan atau kecerobohan dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sehingga laporan keuangan menyesatkan secara material (Tuanakotta, 2010). Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengklasifikasikan bahwa kecurangan dalam laporan keuangan ada 3 (tiga) jenis yaitu penyalahgunaan aset, korupsi, dan kecurangan atas pernyataan. Kecurangan yang sering terjadi dan menimbulkan kerugian besar adalah kecurangan atas pernyataan, sering disebut kecurangan laporan keuangan (Kartikasari dan Irianto, 2010). ACFE menggunakan metode The Fraud Triangle sebagai model dalam berbagai penelitian terkait tindak kecurangan yang terjadi. Ada beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab kecurangan, seperti kelemahan pengendalian internal, konflik kepentingan dari pejabat perusahaan, pegawai dan pejabat yang tidak jujur dan sebagainya. Dalam menjalankan tugasnya sebagai auditor independen, khususnya dalam mendeteksi kecurangan dalam pelaporan keuangan, auditor perlu mengetahui sinyal red flags, mempunyai sikap skeptisme, kompetensi, independensi dan profesionalisme. Oleh karena itu, auditor harus mempunyai dan mempertahankan sikap dan keahliannya tersebut, ini sangat diperlukan auditor agar ia dapat mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan yang telah terjadi dan melakukan pekerjaannya sebagai auditor yang profesional. Seperti yang banyak diketahui, kini semakin marak terjadinya kasus kecurangan dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh entitas – entitas ekonomi yang terlibat didalam kegiatan tersebut. Yang masih sangat di ingat adalah kasus kecurangan yang melibatkan salah satu perusahaan terbesar di dunia yaitu kasus Enron dan World Com, masing–masing perusahaan tersebut memanipulasi labanya hingga memiliki laba usaha yang besar untuk menarik minat investor untuk tetap berinvestasi pada perusahaan tersebut. Ada juga kasus yang terjadi pada Bank of Credit and Commerce International (BCCI) bank ini melakukan tindak kecurangan lebih dari \$20 (dua puluh) Miliar Dolar, dan lebih dari \$13 (tiga belas) Miliar Dolar dana Unaccounted serta tuduhan lainnya yaitu penyuaapan dan mendukung terorisme, pencucian uang (money laundering), penyelundupan, penjualan teknologi nuklir dan lain–lain. Kasus–kasus tersebut hanyalah sebagai contoh kecil dari kasus–kasus yang pernah terjadi terkait dengan tindak kecurangan laporan keuangan di dunia. Namun, kasus–kasus dalam negeri pada sector public pun juga terjadi beberapa tahun lalu. Contohnya Fraud yang masih hangat diperbincangkan adalah ditangkapnya walikota Malang dan beberapa anggota DPRD beberapa

Pengaruh Red Flags dan Independensi Auditor Pemerintah Dalam Mendeteksi Kecurangan (Fraud)

waktu lalu. Mereka ditangkap dalam dugaan kasus suap menyuap terkait pembahasan APBD-P Kota Malang tahun 2015 dimana Mochamad Anton sebagai walikota Malang memberi pelicin kepada anggota DPRD agar rancangan anggaran yang diajukan dapat diterima oleh pihak DPRD Kota Malang. Kasus Penjabat daerah kabupaten Luwu Timur dugaan korupsi dan penggelembungan anggaran pembangunan Stadion Malili Penjabat Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Pemkab Luwu Timur sebagai tersangka periode 2011-2013. Anggaran yang digelembungkan itu mencapai 44 miliar sehingga dalam kasus ini menyebabkan kerugian negara mencapai 1,6 miliar. Berdasarkan data Infokorupsi.com .Kasus korupsi dana DPRD Luwu Timur dengan dugaan korupsi dana pembayaran gaji, tunjangan, biaya perjalanan dinas dan honor legislator DPRD yang dilakukan oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Luwu Timur dan mantan anggota DPRD Luwu Timur dari Fraksi partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyebabkan kerugian negara sebesar 5 miliar, kasus pertanggung jawaban (PJ) Fiktif dana pemilihan legislatif (Pileg) tahun 2014 yang dilakukan oleh penjabat pembuat komitmen (PPK) dan bendahara KPU Luwu Timur karena dianggap telah terbukti melakukan pemotongan dana PPK di 11 kecamatan yang merugikan negara sebesar 651 Juta.

Contoh kasus-kasus tersebut, dapat dilihat bahwa kasus tindak kecurangan semakin marak terjadi di Negara kita ini. Berdasarkan beberapa kasus yang muncul di Indonesia, auditor internal sering juga tidak bisa mendeteksi adanya fraud dan ada pula yang ditemukan melakukan kerjasama atau kolusi dengan beberapa klien yang terlibat pada beberapa kasus kecurangan yang dilakukan namun tidak dilaporkan. Hingga saat ini Indonesia masih bermasalah dengan kecurangan atau kerap disebut dengan masalah korupsi. Meskipun pemerintah telah memiliki 2 (dua) badan audit internal dan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi guna meminimalisir serta mengungkap segala bentuk kecurangan, namun kasus tersebut masih banyak terjadi dan sepertinya sulit untuk dihilangkan. Kesempatan terjadi karena akibat dari transaksi yang besarnya tidak wajar, banyak menggunakan estimasi akuntansi, pertimbangan subjektif atau tidak pasti, operasi internasional, serta perbedaan kultur bisnis. Kesempatan terjadi apabila perusahaan memiliki tata kelola yang buruk. (Hariyanto, et. al. 2012). Rasionalisasi adalah sikap seseorang dalam melakukan justifikasi atas perbuatan yang dilakukan. Hal itu dikarenakan ketidakcukupan informasi dan komunikasi mengenai standar etika yang harus diterapkan dan dipatuhi dalam penerapannya, pertumbuhan laba agresif dan kegagalan penerapan system akuntansi dan pengendalian internal dalam perusahaan (Hariyanto, et. al. 2012). Mendeteksi kecurangan bukanlah tugas yang mudah, karena membutuhkan pengetahuan mengenai karakteristik dan cara melakukan kecurangan. Pendeteksian kecurangan juga tidak selalu mendapatkan titik terang karna ada banyaknya berbagai motivasi yang mendasari dan banyaknya metode dalam melakukan kecurangan (Kassem dan Higson, 2012). Ulasan di atas memberikan penegasan Auditor sangat memerlukan indikator atau tanda untuk memfokuskan kinerja melakukan penaksiran risiko kecurangan dalam investigasinya. Terjadinya berbagai tindak kecurangan tentunya perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, salah satunya auditor internal yang menjadi harapan masyarakat untuk dapat mengungkapkan kecurangan yang terjadi. Alasan ini memberikan dasar bahwa penelitian mengenai metode Red Flags sangat penting untuk dilakukan pada auditor Internal maupun Eksternal dalam mendeteksi adanya kecurangan.

Diharapkan dalam penelitian ini diperoleh bukti empiris tentang Red Flags dan Independensi Auditor Pemerintah dalam mendeteksi kecurangan pada Perusahaan wilayah Jakarta. Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *Red Flags* berpengaruh dalam mendeteksi kecurangan (Fraud) ?
2. Apakah Independensi auditor pemerintah dapat berpengaruh dalam mendeteksi kecurangan (Fraud) ?

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Red Flags

Istilah *Red Flags* atau bendera merah sudah sering digunakan dalam berbagai literatur audit, maknanya adalah tanda bahaya, tanda bahwa ada hal yang tidak sesuai pada tempatnya dan perlu mendapat perhatian. Tuanakotta (2013) dalam Ni Nyoman Ayu Suryandari, I Dewa Made Endiana (2019). Bahwa auditor dan investigator menggunakan tanda bahaya (*Red Flags*) sebagai petunjuk atau indikasi terjadinya *Fraud* atau kecurangan pada sebuah laporan keuangan. *Red flags* juga bisa dikatakan sebagai suatu kondisi yang janggal atau berbeda dengan keadaan normal.

2.1.2. Kecurangan (*Fraud*)

Kecurangan merupakan suatu istilah yang umum, dan mencakup segala macam cara yang dapat digunakan dengan kelihaiian tertentu, yang dipilih oleh seorang individu, untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan melakukan representasi yang salah..

Fraud auditing dapat didefinisikan sebagai audit khusus yang dimaksudkan untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan atau kecurangan atas transaksi keuangan. *Fraud audit* termasuk dalam audit khusus yang berbeda dengan audit pada umumnya terutama dalam hal tujuan yaitu *fraud auditing* mempunyai tujuan yang lebih sempit dan cenderung untuk mengungkapkan suatu kecurangan yang diduga terjadi dalam pengelolaan aset/aktiva.

2.1.3. Pendeteksian Kecurangan (*Fraud*)

Ni Nyoman Ayu Suryandari, I Dewa Made Endiana (2019) menyatakan bahwa kecurangan dalam laporan keuangan jarang dapat terdeteksi jika hanya menganalisis laporan keuangannya saja. Namun memang kecurangan atas laporan keuangan biasanya terdeteksi ketika informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dibandingkan dengan kondisi riil perusahaan. Penelitian menganjurkan agar auditor, investor, regulator atau pemeriksa kecurangan dapat memanfaatkan penggunaan ukuran kinerja non keuangan untuk menilai kemungkinan adanya kecurangan..

2.1.4. Independensi

Independen berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi. Akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Sedangkan, berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam SPAP (2011) PSA No. 4 (SA seksi 220.1), Standar ini mengharuskan auditor untuk bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum, dalam hal ini dibedakan dengan auditor yang berpraktik sebagai intern.

Arens et.al (2015), independensi dalam auditing adalah Seorang anggota yang dalam praktik publiknya harus mandiri dalam memberikan layanan profesional sebagaimana disyaratkan oleh standar yang diumumkan oleh badan yang ditunjuk oleh dewan.

2.1.5. Audit

Pengertian audit yang dikemukakan oleh beberapa ahli akuntansi, diantaranya ada Arens, Elder, dan Beasley (2015), Audit adalah proses untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti yang berkaitan dengan informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat ketersesuaian antara informasi yang ada dengan kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkan Soekrisno Agoes (2015), Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

2.2. Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Pengaruh *Red Flags* Dalam Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*).

Dengan adanya Red Flags memudahkan seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan dan dapat segera mengambil tindakan pencegahan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Putu Della Sabrina Purwanti dan Ida Bagus Putra Astika (2017), yang menjelaskan bahwa red flags berpengaruh positif pada kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud.

Ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran mengenai kemunculan red flags akan membuat auditor melakukan penelusuran atau investigasi secara lebih mendalam terhadap bukti-bukti audit, hal ini dapat membuat kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud semakin tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan hipotesis sebagai berikut:

H1 :Red Flags berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan (*Fraud*)

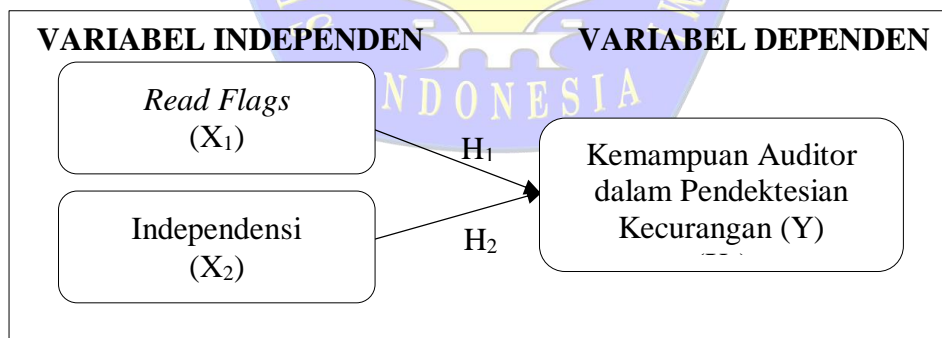
2.2.2. Pengaruh Independensi Auditor Pemerintah Dalam Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*)

Kode etik Akuntan menyebutkan bahwa independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Semakin tinggi sikap independensi auditor maka semakin tinggi pula kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Seorang auditor yang memiliki sikap independensi dalam penugasannya, auditor tersebut bebas mengeluarkan opini audit tanpa tekanan dari pihak manapun sehingga memudahkannya dalam proses mendeteksi kecurangan.

Hal ini dapat membuat kemampuan auditor dalam mendeteksi Fraud semakin tinggi, Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan hipotesis sebagai berikut:

H2 :Sikap Independensi auditor pemerintah berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan (*Fraud*).

2.3. Kerangka Konseptual Penelitian



3. METODA PENELITIAN

3.1. Strategi Penelian

Strategi penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah strategi asosiatif, yaitu, penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, Sugiyono (2016). Hubungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hubungan kausal, yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat, yang terdiri dari variabel Independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel Dependen (variabel yang dipengaruhi) Sugiyono (2016). Strategi dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yaitu suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang

diketahui.

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Sugiyono (2016) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Pada penelitian ini, data Auditor Pemerintah yang dibutuhkan adalah Auditor Pemerintah yang secara teknis bertugas melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan populasi dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan survey pendahuluan di Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) atau lebih dikenal Bagian Personalia Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat DKI Jakarta pada Bulan Juni 2020 memperlihatkan data sebagaimana dalam tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1.

No.	Jabatan Fungsional	Frekuensi
1.	Auditor Madya	18
2.	Auditor Muda	21
3.	Auditor Pertama	29
4.	Auditor Penyelia	3
5.	Auditor Pelaksana Lanjutan	1
6.	Auditor Pelaksana	5
		77

Sumber: Bagian SDM BPKP Pusat DKI Jakarta tahun 2020

Berdasarkan Tabel tersebut di atas, maka populasi dalam penelitian ini sebanyak 77 (Tujuh Puluh Tuju) Orang Auditor Pemerintah Divisi Investigasi (BPKP) Pusat DKI Jakarta.

3.2.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Sampel penelitian ini adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Adapun penentuan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Metode Sensus.

3.3. Data dan Metoda Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan untuk mencapai tujuan penelitian. Data primer merupakan data yang di dapat dari sumber pertama, baik dari perseorangan atau individu seperti data hasil dari wawancara atau dari kuesioner yang telah diisi oleh responden (Sugiyono,2016). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil jawaban responden pada kuesioner yang telah diisi auditor di BPKP Pusat Deputi Investigasi DKI Jakarta.

3.4. Operasional Variabel

Tabel 3.1.

Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
Red Flags (X ₁)	Auditor dan investigator menggunakan tanda bahaya (<i>red flags</i>) sebagai petunjuk atau indikasi terjadinya fraud atau kecurangan pada sebuah laporan keuangan. Ni Nyoman Ayu Suryandari, I Dewa Made Endiana (2019).	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami karakteristik tekanan b. Informasi Audit c. Pengawasan Manajemen d. Transaksi yang tidak biasa e. Sistem Informasi dan Akuntansi 	Skala <i>Likert</i>
Independensi Auditor pemerintah (X ₂)	Independensi dalam audit adalah seorang dalam praktik publiknya harus Mandiri dalam memberikan layanan profesional sebagaimana diisyaratkan oleh Standar yang diumumkan oleh badan yang ditunjuk oleh dewan. Arens et.al (2015).	<ul style="list-style-type: none"> a. Hubungan keluarga dengan klien b. Hubungan usaha dan keuangan dengan klien c. Pemberian fasilitas dan bingkisan d. Keterlibatan dalam usaha yang tidak sesuai e. Bersikap jujur dalam melakukan pekerjaan audit 	Skala <i>Likert</i>

Pendeteksian Kecurangan (Y)	Kecurangan dalam laporan keuangan jarang dapat terdeteksi jika hanya menganalisis laporan keuangannya saja. Ni Nyoman Ayu Suryandari, I Dewa Made Endiana (2019).	a. Pengendalian Internal b. Pelatihan deteksi kecurangan c. Penggunaan teknik audit infestigatif untuk mengungkap fraud dalam pengadaan barang d. Penggunaan <i>Computer forensics</i> e. Penggunaan teknik interogasi f. Penggunaan operasi penyamaran g. Pemanfaatan <i>wishleblower</i>	Skala <i>Likert</i>
-----------------------------	--	--	---------------------

3.5. Metode Analisis Data

Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah metoda analisis data secara kuantitatif. Metode analisis data secara kuantitatif ini menggunakan data berupa angka-angka dan menekankan pada proses penelitian pengukuran hasil objektif dengan menggunakan analisis statistik deskriptif.

4. PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1. Profil Objek Penelitian

BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebagaimana diamanatkan dalam dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi :

- a). kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
- b). kegiatan kebhendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;
- c). Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.

4.1.2. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap auditor yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat yang beralamat di Jl. Pramuka No. 33 Rt.10 Rw. 08 Kelurahan Utan Kayu, Kecamatan Matraman Jakarta Timur 13120. Pengumpulan data melalui Kuesioner kepada Auditor Investigasi telah mendapat izin dari Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Badan

Pengaruh Red Flags dan Independensi Auditor Pemerintah Dalam Mendeteksi Kecurangan (Fraud)

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: S-647/SU04/3/2020 Tanggal 24 Juni 2020 Perihal: Permohonan Izin Penyampaian Kuesioner yang ditujukan kepada Deputy Kepala BPKP Bidang Investigasi di Jakarta. Sedangkan waktu penelitian dimulai dari tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan 22 Juli 2020.

4.2. Deskripsi Responden Penelitian

Data sampel penelitian berdasarkan Jabatan Fungsional Auditor yang diperoleh dari Bagian Sumber Daya Manusiis (SDM) BPKP Pusat DKI Jakarta Deputy Investigasi pada tahun 2020 menunjukkan bahwa Jabatan Fungsional Auditor Pemerintah Deputy Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat DKI Jakarta terdiri dari (1) Auditor Madya sebanyak 18 (delapan belas) orang, (2) Auditor Muda sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, (3) Auditor Pertama sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) orang, (4) Auditor Penyelia sebanyak 3 (tiga) orang, (5) Auditor Pelaksana Lanjutan sebanyak 1 (satu) orang, dan (6) Auditor Pelaksana sebanyak 5 (lima) orang.

4.3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Red Flags, Independensi Auditor Pemerintah Deputy Investigasi BPKP Pusat DKI Jakarta dan Fraud akan diuji secara Statistik Deskriptif.

Tabel 4.1.
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
RedFlags	77	16	25	23,19	2,090
Independensi	77	15	25	22,32	2,731
Fraud	77	21	35	30,13	3,338
Valid N (listwise)	77				

Sumber: Output SPSS (data diolah,2020)

4.4. Hasil Uji Kualitas Data

4.3.1. Hasil Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid atau sah jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dilakukan dengan cara melihat korelasi skor

butir pertanyaan dengan total skor variabel melalui program SPSS dengan melihat pada kolom *Corrected Item – Total Correlation* (Ghozali, 2016).

4.3.2. Uji Reliabilitas

Alat yang digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. suatu kuesioner dikatakan Reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016). Jadi, untuk menguji reliabilitas jawaban responden dapat menggunakan uji statistik dengan melihat nilai *Cronbach Alpha* (α). *Nunnaly Cronbach Alpha* $> 0,70$. Jika tidak, maka data tersebut dianggap tidak reliabel (Ghozali, 2016). Tabel 4.2 menunjukkan hasil uji reliabilitas untuk empat variabel penelitian yang dipakai pada penelitian ini.

Tabel 4.2.

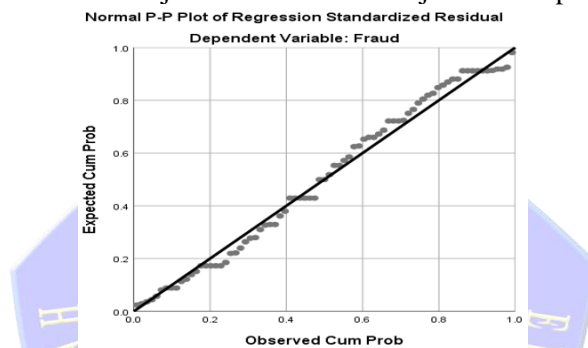
Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Red Flags	0,811	Reliabel
Independensi Auditor	0,882	Reliabel
Kecurangan	0,785	Reliabel

Sumber: Output SPSS (data diolah,2020)

4.4. Hasil Uji Asumsi Klasik

4.4.1. Hasil Uji Normalitas

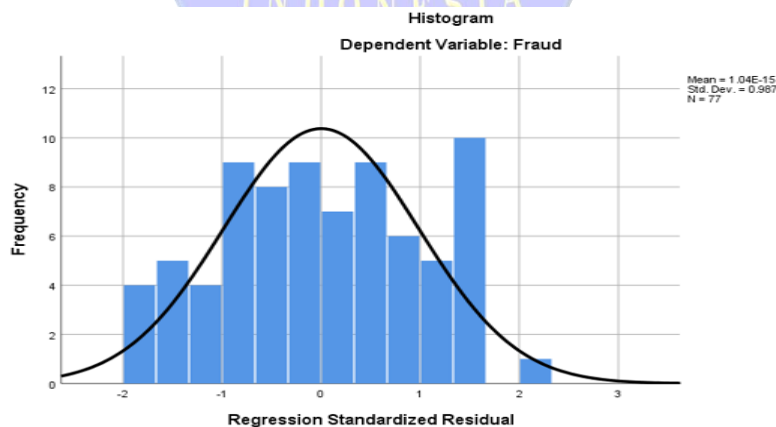
Uji normalitas ini digunakan untuk dapat menguji apakah dalam model regresi, variabel independen serta variabel dependen memiliki distribusi normal atau tidak. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji f menjelaskan bahwa nilai residual mengikuti nilai normal. Jika asumsi tersebut dilanggar maka, uji statistik akan menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2016).



Gambar 4.1. Hasil Uji Normalitas *P-P Plot or Regression*

Sumber: Output SPSS (data diolah, 2020)

Pada grafik normal P-Plot diatas, menjelaskan bahwa penyebaran data yang berada disekitar garis diagonal serta mengikuti arah garis diagonal, dengan begitu model regresi memenuhi asumsi normalistik.



Gambar 4.2. Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram

Sumber: Output SPSS (data diolah 2020)

Gambar hasil uji normalitas grafik histogram memperlihatkan penyebaran data yang berada disekitar garis arah diagonal. Ini menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

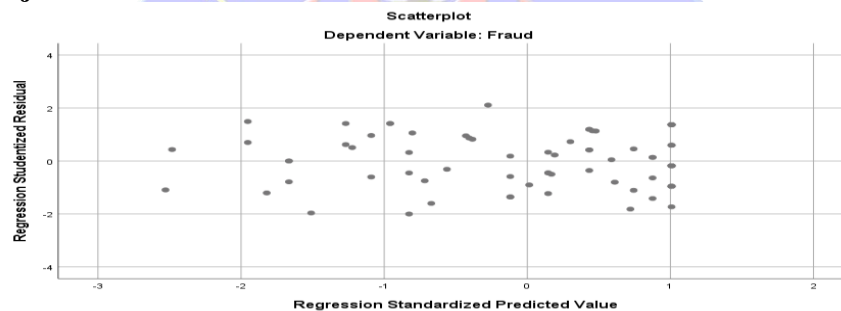
Tabel 4.3. Hasil Uji Normalitas *One Sample Kolmogorov-Smirnov*

		Unstandardized Residual
N		77
Normal Parameters a,b	Mean	.0000000
	Std. Deviation	128.895.324
Most Extreme Differences	Absolute	.065
	Positive	.065
	Negative	-.062
Test Statistic		.065
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200c,d

- a. Test distribution is Normal.
 - b. Calculated from data.
 - c. Lilliefors Significance Correction.
 - d. This is a lower bound of the true significance.
- Sumber: Output SPSS (data diolah, 2020)

Pada tabel 4.3 diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa nilai seluruh variabel dari Kolmogorov-Smirnov $> 0,05$ yang terlihat pada Asymp. Sig yaitu 0,200. Dengan demikian dapat di katakan bahwa data terdistribusi secara normal.

4.4.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Gambar 4.3. Hasil Uji Heteroskedastisitas Dengan Grafik *Scatterplot*
Sumber: Output SPSS (data diolah,2020)

Pada gambar 4.3 diatas, menunjukkan bahwa data tersebar diatas serta di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Hal ini menjelaskan berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi kecurangan (*Fraud*) berdasarkan variable yang mempengaruhi yakni Red Flags dan Independensi Auditor Pemerintah BPKP Pusat DKI Jakarta.

4.4.3. Hasil Uji Multikolonieritas

Tabel 4.4. Hasil Uji Multikolonieritas

Model	(Constant) RedFlags Independensi	coefficient ^a	
		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1		.499	2.004
		.499	2.004

a. Dependent Variable: *Fraud*

Sumber: Output SPSS (data diolah, 2020)

Berdasarkan hasil Uji Multikolonieritas sebagaimana dalam Tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa variabel Red Flags mempunyai nilai VIF sebesar 2,004 dan variabel Independensi Auditor Pemerintah BPKP Pusat DKI Jakarta sebesar 2,004. Sehingga tabel di atas juga menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki nilai tolerance di atas 0,10. Sehingga dapat dikatakan bahwa semua variabel yang digunakan pada penelitian ini tidak mempunyai masalah multikolonieritas.

4.5. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikan pengaruh Red Flags (X1) dan Independensi Auditor pemerintah (X2) terhadap Fraud (Y), apakah masing-masing variabel berpengaruh positif atau negatif. Tabel 4.19 menunjukkan Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda sebagai berikut.

Tabel 4.5. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.926	1.671		.554	.581
RedFlags	.407	.101	.255	4.014	.000
Independensi	.885	.078	.724	11.393	.000

a Dependent Variable: *Fraud*

Sumber: Output SPSS (data diolah, 2020)

Berdasarkan tersebut di atas menunjukkan hasil yang diperoleh dari koefisien regresi di atas, sehingga dapat dibuat suatu persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,926 + 0,407X1 + 0,885X2 + e$$

4.6. Hasil Uji Hipotesis

4.6.1. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.922 ^a	.851	.847	1.306

a Predictors: (Constant), Independensi, *RedFlags*

b Dependent Variable: Fraud

Sumber: Output SPSS (data diolah, 2020)

Berdasarkan hasil analisis pada tabel tersebut di atas, maka nilai R sebesar 0,922 atau 92,2%, dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan atau korelasi antara faktor-faktor yang mempengaruhi Mendeteksi Kecurangan (Fraud) karena lebih besar dari 0,50. Nilai koefisien determinasi (adjusted R-Square) dalam penelitian ini, memiliki angka sebesar 0,847 atau 84,7% artinya variabel Red Flags dan Independensi Auditor Pemerintah BPKP Pusat DKI Jakarta hanya dapat menjelaskan sebesar 84,7% dari Mendeteksi Kecurangan (Fraud). Dan sisanya sebesar 15,3% (100%-84,7%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam variabel penelitian. Standar error of estimation (SEE) sebesar 1,306. Semakin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.

4.6.2. Hasil Uji Parsial Untuk Koefisien Regresi (Uji Statistik t)

H_1 : Red Flags berpengaruh positif dan signifikan dalam mendeteksi Kecurangan (Fraud)

Hasil perhitungan uji parsial pengaruh Red Flags (X1) terhadap Mendeteksi kecurangan (Y) diperoleh nilai thitung sebesar 4.014 serta ttabel sebesar 1,993, hal ini menunjukkan bahwa nilai thitung > ttabel dan signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Dengan demikian untuk variabel Red Flags memiliki pengaruh signifikan dalam Mendeteksi Kecurangan (Fraud).

H_2 : Independensi auditor pemerintah berpengaruh positif dan signifikan dalam mendeteksi Kecurangan (Fraud)

Hasil perhitungan uji parsial pengaruh Independensi Auditor pemerintah (X2) terhadap Mendeteksi kecurangan (Y) diperoleh nilai thitung sebesar 11.393 serta ttabel sebesar 1,993, hal ini menunjukkan bahwa nilai thitung > ttabel dan signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Dengan begitu, untuk variabel Independensi Auditor Pemerintah BPKP Pusat DKI Jakarta memiliki pengaruh signifikan dalam Mendeteksi Kecurangan (Fraud).

5. SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

5.1. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menemukan bukti empiris pengaruh Red Flags dan Independensi Auditor Pemerintah dalam mendeteksi kecurangan di wilayah Jakarta dengan responden penelitian sebanyak 77 auditor BPKP Pusat Deputy Investigasi. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi linear berganda, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Red Flags berpengaruh positif dan signifikan dalam mendeteksi kecurangan (Fraud). Seorang auditor harus dapat mengenali Red Flags yang merupakan suatu kondisi yang janggal atau berbeda dengan keadaan normal. Hal ini membuktikan bahwa metode Red Flags dalam bentuk pengawasan sebagai awal mulanya petunjuk atau indikasi akan

adanya sesuatu yang tidak bias dan merupakan tanda-tanda bahwa Fraud terjadi. Hal tersebut dikupas dalam Workshop on Strengthening Integrity in the Procurement and Contract Implementation of Government Projects yang diselenggarakan oleh World Bank bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tanggal 11 maret 2016. Workshop ini menjelaskan Korupsi atau fraud dapat terjadi pada tahap perencanaan pengadaan barang/ jasa (Planning and Design), tahap proses pengadaan barang/jasa (Procurement), dan tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa (Implementation). Beberapa contoh korupsi/fraud pada Planning and Design yang dikemukakan oleh narasumber adalah intervensi politik (political interference), menambahkan item-item yang tidak perlu (unnecessary items), membuat spesifikasi secara bias (biased specifications), dan korupsi dalam pengadaan tanah.

Pada proses pengadaan bisa terjadi fraudulent bids, kolusi (collusion), bid rigging, dan konflik kepentingan (conflict of interest). Untuk tahap implementasi, bentuk fraud/ korupsi dapat berupa pekerjaan di bawah standar (substandard work), theft and personal use of assets, payroll fraud, dan falsified implementation reports and audits. Auditor Pemerintah harus dapat mengidentifikasi red flags tersebut yang merupakan awal dari sebuah fraud/ korupsi. Workshop juga membahas dua buah kasus terkait proses pengadaan barang/ jasa yang biasa diadakan dengan sumber dana dari bank dunia.

2. Independensi Auditor Pemerintah BPKP Pusat DKI Jakarta berpengaruh positif dan signifikan dalam mendeteksi kecurangan (Fraud). Hal ini berarti dalam melaksanakan tugasnya, auditor menjaga persepsi Independensi dari semua pihak yang berpekerjaan dan auditor hanya berkewajiban jujur dalam auditannya. Sebagaimana yang telah terlampir dalam Peraturan BPKP RI Nomor 3 tahun 2019 tentang Pengawasan Intern atas pengadaan barang/ jasa Pemerintah. Hal ini juga didukung Pengawas hanya perlu bersikap jujur dan transparan dengan kondisi yang ada sebagai mana yang dijelaskan pada laporan kinerja BPKP tahun 2019, Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif, Kegiatan pengawasan intern BPKP diarahkan untuk memastikan bahwa governance process dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan telah berjalan secara partisipatif, akuntabel, transparan dan efektif.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian ini dan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain:

- 1). Red Flags, bagi para Auditor BPKP/ KAP, Internal, Eksternal di seluruh Indonesia diharapkan dapat mengenali Red Flags yang merupakan suatu kondisi yang janggal atau berbeda dengan keadaan normal dalam bentuk pengawasan sebagai awal mulanya petunjuk atau indikasi akan adanya sesuatu yang tidak bias dan merupakan tanda-tanda bahwa Fraud terjadi. Hal tersebut demi menciptakan Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif, Kegiatan pengawasan diarahkan untuk memastikan bahwa governance process dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan telah berjalan secara partisipatif, akuntabel, transparan dan efektif untuk membrantas kecurangan (Fraud) dalam pelaksanaan demi lancarnya kegiatan yang sedang dijalankan.
- 2). Independensi Auditor, bagi para Auditor BPKP/ KAP, Internal, Eksternal di seluruh Indonesia diharapkan dapat mempertahankan Prinsip Independensinya dalam memberikan penilaian secara real dengan kondisi sebenarnya untuk melaksanakan tanggung jawab pengawasan secara objektif.

5.3. Keterbatasan Masalah dan Pengembangan Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada penelitian ini sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya, yaitu:

- 1). Peneliti mengalami kesulitan saat melakukan penyebaran dan pengumpulan data kuesioner, hal tersebut dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan beberapa responden auditor tidak berada dalam lingkungan kerjanya. Sehingga banyak Responden dalam penelitian ini sangat sulit untuk menerima kuesioner via offline maupun online secara cepat dan tepat.
- 2). Peneliti mengalami kesulitan saat memintai pendapat dari responden mengenai pernyataan dan profil yang berupa data Pribadi atau Rahasia dalam kepentingan menyukseskan dan menambah bukti penelitian ini, sebagai contohnya adalah Surat Independensi yang ditandatangani oleh Auditor sebelum melakukan pekerjaannya.



DAFTAR REFERENSI

Agoes, Sukrisno. (2015). "Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik". Jilid 1, Edisi 4, Jakarta: Salemba empat.

Arens, Alvin A., dkk. (2015). Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi. Edisi 12. Jakarta: Erlangga.

Annas Rahmat Ramadhani, Iwan Triyuwono, Lilik Purwanti (2019). "Mengungkap cara melakukan praktik Fraud di pemerintah kota Malang". P-ISSN:1411-6510, e-ISSN:2541-6111, Vol.4 No.1 April 2019.

Cristian Baú Dal Magro, Paulo Roberto da Cunha, Red flags in detecting credit cooperative fraud: the perceptions of internal auditors, *Review of Business Management*, São Paulo, Vol. 19, No. 65, p. 469-491, Jul./Sep. 2017 ISSN 1806-4892, e-ISSN 1983-0807, DOI: 10.7819/rbgn.v19i65.2918.

Hariyanto, E., Y.A. Sudibyo, dan I.R. Bawono. 2012. "Pengaruh Pengalaman dan Skeptisisme terhadap Pemahaman Auditor tentang Red Flags". *Akuntabilitas: Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Vol. 11, No. 2, hlm 179-197.

Hulsart, R.W., K.M. James dan D.M. Cummings. 2012. "Fraud in The Lost Decade: The Impact of The Economic Downturn on The Prevalence of Fraud". *Business Studies Journal*, Vol. 4, No. 1, hlm 9-24.

I Gusti Ayu Putu Della Sabrina Purwanti Ida Bagus Putra Astika, Pengaruh Auditor's Professional Skepticism, Red Flags, Beban Kerja Pada Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Fraud, *E-Jurnal Akuntansi Universitas* 1160-1185, Vol.21.2. November (2017): Udayana DOI: <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i02.p11> ISSN: 2302-8556

Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. Yogyakarta: CV. Andi

Kassem, R. dan A. Higson. 2012. "The New Fraud Triangle Model". *Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences*, Vol. 3, No. 3, hlm 191-195

Kumaat, V. G. (2011). *Internal Audit*. Jakarta: Erlangga

Pengaruh Red Flags dan Independensi Auditor Pemerintah Dalam Mendeteksi Kecurangan (Fraud)

Kristine Belaja, Intan Salwani Mohamed and Nabilah Rozzani, Whistleblowers Role In Mitigating Fraud Of Malaysian Higher Education Institutions, *Asian Journal of Accounting Perspectives*, 12(2), 67-81.

Lale Aslan, Independent Audit Firm Reliability In Turkey: A Research On Cmb Sanctions, Submitted: 30.08.2017, Resubmitted: 15.09.2017, Accepted: 15.09.201

Lina Dwi Kumala Sari, I Dewa Nyoman Wiratmaja, Motivasi Kerja dan Profesionalisme Memoderasi Pengaruh Kompleksitas Tugas Pada Kinerja Auditor, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, , ISSN: 2302-8556 DOI: <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i03.p28> Vol.21.3. Desember (2017): 2479-2508

Mulyadi. 2014. *Sistem Akuntansi*. Cetakan Keempat. Jakarta: Salemba Empat.

Ni Nyoman Ayu Suryandari, I Dewa Made Endiana, *Fraudulent Financial Statement*, CV. NOAH ALETHEIA, Badung Bali 2019

Nur Azis Pratama, Edi Sukarmanto, Pupung Purnamasari, Pengaruh Red Flags dan Whistleblowing System terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan (Fraud) (Studi Empiris pada BUMN di Kota Bandung) *The Effect of Red Flags and Whistleblowingsystem on the auditor's ability to detect fraud*, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, ISSN: 2460-6561.

Posma Sariguna Johnson Kennedy dan Santi Lina Siregar. 2017. *Fraud Actors in Indonesia According to Fraud Indonesia Survey*. *Buletin Ekonomi FE UKI* ISSN - 14103842 Vol. 21 No. 2

Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, *Laporan Kinerja 2019*, Nomor : LKJ-09/PW09/1/2020, Tanggal 10 Januari 2020

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor: Per – 1274/K/Jf/2010 Tentang Pendidikan, Pelatihan Dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Raviana Hassan (2019), Pengaruh Etika Profesi Dan Independensi Auditor Terhadap Pendeteksian Fraud Dengan Profesionalisme Auditor Sebagai Variabel Moderasi, *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, Vol. 6 No. 2 September 2019 : 145-172, ISSN : 2339-0859 (Online) Doi: <http://dx.doi.org/10.25105/jmat.v6i2.5559>.

Sandi Prasetyo. (2015). Pengaruh Red Flags, Skeptisme Profesional Auditor, Kompetensi, Independensi, Dan profesionalisme Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik). *Jom FEKON*, 2 (1), 1–15.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tuanakotta, T.M. 2010. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.

Tuanakotta, Theodorus, M. 2013. *Audit Berbasis ISA (International Standard on Auditing)*. Jakarta: Salemba Empat.

Yanti, H. B. (2017). Pemahaman Auditor Tentang Skema Kecurangan, Red Flags, Mekanisme Deteksi Dan Mekanisme Preventif Kecurangan. *Media Riset Akuntansi, Auditing Dan Informasi*, 13 (3), 31. <https://doi.org/10.25105/mraai.v13i3.1748>

Zimbleman, Mark F. 2014. *Akuntansi Forensik*, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

